

DAFTAR PUSTAKA

Vienna Convention On The Law Of Treaties. (1969, Mei 23).

Dipetik Agustus 05, 2017, dari Kamila Hippy:

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.ph>

undang-undang negara republik indonesia nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. (1997). Dipetik Juli 29, 2017,

dari bpkp.go.id:

<http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/442.bpkp>

Pembukaan undang-undang dasar 1945. (2002, Agustus 10).

Dipetik Agustus 02, 2017, dari jdih:

<http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi ke empat.

(2008). Dipetik Agustus 13, 2017, dari unila.ac.id:

<http://digilib.unila.ac.id/5849/14/BAB%20II.pdf>

Penjelasan atas undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan convention on the rights of persons with disabilities (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. (2011). Dipetik Agustus 13,

2017, dari bphn.go.id:

<http://www.bphn.go.id/data/documents/11uu019.pdf>

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan

Hak-Hak Penyandang Disabilitas. (2012). Dipetik Agustus 13, 2017, dari [bphn.go.id](http://www.bphn.go.id):
<http://www.bphn.go.id/data/documents/perda4-2012.pdf>

Dinsos Catat Ada 25 Ribu Lebih Penyandang Disabilitas di DIY diakses dari . (2016, Maret 18). Dipetik Agustus 15, 2017, dari Tribun Jogja: <http://jogja.tribunnews.com>

Menyoal Hak Difabel dalam Dunia Kerja. (2016, Oktober 04). Dipetik April 20, 2018, dari soldier.id:
<https://www.solider.id/2016/10/04/menyoal-hak-difabel-dalam-dunia-kerja>

Perda dan Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas Perda dan Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas. (2016). Dipetik Agustus 15, 2017, dari presidenri.go.id:
<http://presidenri.go.id/berita-aktual/perda-dan-bantuan-bagi-penyandang-disabilitas.html>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. (2016). Dipetik Agustus 13, 2017, dari kemendagri.go.id:
http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu_nomor_8_tahun_2016.pdf

Ade Pringani dan Fitria Budi Widya Hanny. (t.thn.). Peranan International Labour Organization Melalui Proyek Propel Indonesia dalam mempromosikan Hak Kesempatan Kerja

bagi Para penyandang Disabilitas Di Indonesia. *gps Hi Unikom*.

Agendaasia. (t.thn.). *Sejarah United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Dipetik Mei 01, 2018, dari Agendaasia.org:
<http://www2.agendaasia.org/index.php/id/artikel/berita/178-sejarah-united-nations-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities>

Andi sandi Ant.T.T dan Agustina Merdekawati. (2012).
Konsekuensi Pembatalan Undang-Undang Ratifikasi Terhadap Keterikatan Pemerintah Indonesia Pada Perjanjian Internasional. *Mimbar Hukum UGM*, 462-465.

Andriani, N. S. (2016). Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengarusutamaan Manajemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional. *Palastren*, 191.

Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana, dan M. Yasin Al Arif. (2014). Bantuan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya mewujudkan Acces to Justice. *e-Journal Universitas Islam Indonesia*, 465.

APC. (t.thn.). *Asia-Pacific Development Center On Disability Background*. Dipetik Mei 21, 2018, dari Asia-Pacific.Organization:
<http://www.apcdfoundation.org/?q=background>

- Banner, W. (1974). *Compensatory Justice*. Washington, D.C: The Society For social Philosophy.
- Barbotte, E.Guillemain, F.Chau, N. Lorhandicap . (2011). Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population. *Bulletin of the World Health Organization*, 1047.
- Barbotte, E.Guillemain, F.Chau, N. Lorhandicap Group. (2011). Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature, Bulletin of the World Health Organization. *Buletin Of WHO*, 1047.
- Betram I. Spector and I. William Zartman. (2003). *Getting It Done Postagreement Negotiation and International Regimes*. Washington, D.C: United State Institute of Peace Press.
- Bund, A. S. (2015). *Approach*. Dipetik Mei 21, 2018, dari ASB Organization: <http://www.asbindonesia.org/approach.html>
- Cahyo, O. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Diy Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyandang Disabilitas. *e-Journal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Christer Jönsson and Jonas Tallberg. (1998). Compliance and Post-Agreement Bargaining. *European Journal of International Relations*, 378-379.

- Dalen, M. (2004). The relationship between disability, gender and education in the Norwegian context. *Education for All Global Monitoring Report 2003/4* .
- Desy Susilawati dan Andi Nur Aminah. (2016). *Indonesia Miliki 12 Persen Penyandang Disabilitas* . Jakarta: Republika.
- Dewi, U. (2015). Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Pekerjaan Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 77.
- Diono, A. (2014). *Situasi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.
- DIY, D. (2012). *Bahan Acara No. 8 Tahun 2012: Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: DPRD DIY.
- Eddy Asnawi, Latifah Hannah Amahoru dan Birman Simamora. (2013). Pelaksanaan Dan Kendala Dalam Penyusunan Program Legislasi Daerah Provinsi Riau. *PPM Universitas Lancang Kuning. Riau*.
- Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati . (2011). *Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat*. Yogyakarta: Balai Besar Penelitian Pengembangan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).

- Fajri Nursyamsi, Estu Dyah Arifianti, Muhammad Faiz Aziz, Putri Bilqish, Abi Marutama. (2016). *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia*. Dipetik Agustus 02, 2017, dari Pusat Studi Hukum dan kebijakan Indoensia:
<http://www.pshk.or.id/wpcontent/uploads/2016/01/Kerangka-Hukum-Disabilitas-di-Indonesia.pdf>
- Ham, K. (2013, November 25). *Rekomendasi Komnas HAM untuk akses Difabel di Pemilu 25 November 2013*. Dipetik April 20, 2018, dari Soldier.id:
www.solider.id/2013/11/25/rekomendasi-komnas-ham-untuk-akses-difabel-di-pemilu
- Handicap, I. (t.thn.). *Humanity Iclusion Indonesia Human Right*. Dipetik Mei 23, 2018, dari International Handicap Organization website: <http://www.hi-us.org/indonesia>
- Hill, R. E. (2002). Compensatory Justice: Over Time and Between Groups. *The Journal of Polittical Philosophy*, 393-397.
- Irwanto, E. R. (2010). Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review. *Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia*, 2.
- Iskandar, P. (2013). *Hukum HAM Internasional*. Cianjur: IMR Press.

- Islam, M. R. (2014). Implementasi Peraturan Daerah istimewa Yogyakarta No.4 tahun 2012 Dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas. *Digital Library Uin Sunan Kalijaga*, 1.
- Iwan Sutardi Budi Santoso, S. M. (2016). Distorsi Dan Kendala Dalam Proses Kebijakan Publik Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Bapeda*.
- Jayani, A. D. (2014). Konstruksi Different Abled People (Difabel) Studi mengenai Pandangan Mahasiswa Difabel terkait Konstruksi Difabelitas di Universitas Gadjah Mada. *Repository UGM*, 1.
- Julianto. (2013, April 06). *Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta* . Dipetik Agustus 06, 2017, dari Soldier (Kantor Berita Difabel Indonesia):
<https://www.solider.co.id>
- Kasim, A. (2011). Proses Pembentukan Undang-Undang Pasca Pergeseran Kekuasaan Legislatif dari Presiden Ke DPR. *Junal Untad*, 17.
- Kasim, E. R. (2013). Kronologisupaya Ratifikasi The Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Di Indonesia. *Disabilities Rights Fund*.

- Maftuhin, A. (2016). Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang DisabilitasI. NKLUSI. *Journal of Disability Studies Vol. 3, No. 2*, 150.
- Mardalis. (1990). Metode Penelitian Suatu Pendekatan. *Pustaka Sinar Harapan*, 77.
- Mardalis. (1990). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Maxwel, P. J. (t.thn.). Dipetik Oktober 30, 2017, dari e-jurnal.uajy.ac.id: <http://e-jurnal.uajy.ac.id/3398/3/2TA13145.pdf>
- Nursyamsi, F. d. (2016, Januari). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Dipetik Agustus 2, 2017, dari phsk.or.id: <http://www.pshk.or.id/wpcontent/uploads/2016/01/Kerangka-Hukum-Disabilitas-di-Indonesia.pdf>
- Organization, I. L. (2013, April 4). *Inclusion of People with Disabilities in Indonesia*. Dipetik Mei 21, 2018, dari Ilo Organization Website: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_210477.pdf
- Pawestri, A. (2017). *Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional*. Surakarta: Era Hukum.

- Poerwanti, S. D. (2017). Pengelolaan Tenaga Kerja Difabel untuk Mewujudkan Workplace Inclusion INKLUSI. *Journal of Disability Studies*.
- Portuna, R. T. (2015). Proses Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Academia*, 31.
- Prooijen, J.-W. V. (2019). Retributive Versus Compensatory Justice: Observers' Preference for Punishing In Response to Criminal Offence. *European Journal of Social Psychology* , 72.
- Purba, L. (2011, Juny 6). *Kekerasan Terhadap Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perdagangan Orang*. Dipetik December 8, 2017, dari Kemenpppa.go.id: <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/5a3f9-8.-kekerasan-terhadap-perempuan.pdf>
- Putra, A. A. (2015). Tingkat Partisipasi Politik Difabel Pada Pemilu Presiden Tahun 2014 di Kota Yogyakarta. *e-Journal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Putra, A. A. (t.thn.). Tingkat Partisipasi Politik Difabel Pada Pemilu Presiden Tahun 2014 di Kota Yogyakarta. *Repository UMY*, 3.
- Rima Setyaningsih dan Th. A. Gutama. (2016). Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel (Studi Kasus pada Peran Paguyuban Sehati dalam Upaya Pengembangan

Kemandirian bagi Kaum Difabel di Kabupaten Sukoharjo). *Lab Sosio, Sosiologi, FISIP, UNS*, 43.

Ro'fah, A. d. (t.thn.). KEBIJAKAN BERBASIS HAK: Pengalaman Pemerintah DIY Dalam Penyusunan PERDA Penyandang Disabilitas. *Digilib UIN Sunan Kalijaga*, 298.

Rompis, K. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *e-Journal Unsrat*.

Rosenfeld, M. (1991). *Affirmative Action and Justice: A Philosophical and Constitutional Inquiry*. New Haven: Yale University Press.

S, D., & N.A, A. (2016, Desember 12). *Indonesia memiliki 12 Persen penyandang Disabilitas*. Dipetik Agustus 06, 2017, dari Republika Online: Indonesia Miliki 12 Persen Penyandang Disabilitas <http://www.republika.co.id>

Salim, I. (2015). Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia. *Jurnal Politik*, 132.

Sapto Nugroho, Risnawati Utami. (2008). *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*. Surakarta: Yayasan Talenta.

- Sayuti, H. (2013). Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan). *Menara*, 41.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1985). Penelitian Hukum Normatif. *Kamila Hippy*, 14.
- Sosialisasi Informasi Kerja Bagi Penyandang Disabilitas*. (t.thn.). Dipetik November 2, 2017, dari brptd.jogjaprov.go.id: <http://brptd.jogjaprov.go.id/sosialisasi-informasi-kerja-bagi-penyandang-disabilitas/>
- Suharso, P. (2016). Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat). *Al-Mawarid Edisi XVI*, 234.
- Surwandono. (2010). Dinamika Penyebab Konflik Mindanao. 29-31.
- Ulia, A. (2004). *Manifesto Intelektual Organik*. Al-Manar.
- UMY, B. (2015). *Hak Penyandang Disabilitas Di DIY Belum Terpenuhi*. Dipetik Agustus 15, 2017, dari umy.ac.id: <http://www.umy.ac.id/hak-penyandang-disabilitas-diy-belum-terpenuhi.html>
- UMY, B. (2015, Agustus 31). *Hak Penyandang Disabilitas Di DIY Belum Terpenuhi*. Diakses dari . Dipetik Agustus 15, 2017, dari UMY: <http://www.umy.ac.id>

Undang-undang dasar 1945 setelah amandemen. (t.thn.). Dipetik Agustus 2, 2017, dari docdroid.net:
<https://www.docdroid.net/Czn3UIy/uud-1945-setelah-amandemen.pdf#page=8>

Undang-undang dasar 1945 setelah amandemen. (t.thn.). Dipetik Agustus 02, 2017, dari Docdroid:
<https://www.docdroid.net/Czn3UIy/uud-1945-setelah-amandemen.pdf#page=8>

UNESCO. (2009). *Teacing Children With Disabilities in Inclusive Settings*. Bangkok.

Utami, R. (t.thn.). Bagian Pendahuluan. *Repository UMY*, 1.

Wardani, A. K. (2014, September 24). *Akses Terhadap Hukum Dan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Dipetik November 1, 2017, dari Pprbmsolo.org: <http://pprbm-solo.org/2014/09/24/artikel1/>

Yogyakarta, D. S. (2016). *Ada 25 Ribu Lebih Penyandang Disabilitas di DIY*. Yogyakarta: Tribunnews.

Yogyakarta, D. S. (2016). *Ada 25 Ribu Lebih Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta*. Yogyakarta: Tribunnews.